

**STRATEGI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN
MARITIM MELALUI *CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL
REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY (CTI-CFF)***

Oleh : Fajrianti Wahyuni

Pembimbing : Dr. Mohammad Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

CTI-CFF merupakan bentuk kerja sama multilateral yang dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat keamanan maritim melalui pendekatan konservasi dan tata kelola berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim melalui pelaksanaan program-program CTI-CFF.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori neoliberalisme institusional. Fokus utama diarahkan pada peran institusi dalam menciptakan mekanisme kerja sama yang mendorong kepercayaan, transparansi, dan kepatuhan dalam menghadapi tantangan maritim transnasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui tiga program utama, Indonesia berhasil memanfaatkan CTI-CFF tidak hanya untuk tujuan konservasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menghadapi ancaman keamanan maritim non-tradisional. Keterlibatan aktif Indonesia dalam institusi ini memperkuat posisi diplomatik dan mencerminkan konsistensi dalam menjaga stabilitas kawasan secara kolektif.

Kata kunci: CTI-CFF, Indonesia, Keamanan Maritim, Kerja Sama Multilateral

ABSTRACT

CTI-CFF is a form of multilateral cooperation that Indonesia utilizes to strengthen maritime security through conservation and sustainable management approaches. This study aims to analyze Indonesia's strategy in improving maritime security through the implementation of CTI-CFF programs.

This study employs a descriptive qualitative approach with an institutional neoliberalism theoretical framework. The primary focus is on the role of institutions in creating cooperation mechanisms that foster trust, transparency, and compliance in addressing transnational maritime challenges.

The results of this study show that through three main programs, Indonesia has successfully utilized CTI-CFF not only for conservation purposes but also as a strategic instrument in addressing non-traditional maritime security threats. Indonesia's active involvement in this institution strengthens its diplomatic position and reflects its consistency in maintaining collective regional stability.

Keywords: CTI-CFF, Indonesia, Maritime Security, Multilateral Cooperation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak strategis di kawasan Indo-Pasifik. Posisi geografis ini menjadikannya sebagai titik temu antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sekaligus jalur utama perdagangan internasional. Wilayah maritim Indonesia mencakup lebih dari 3 juta km², disertai garis pantai sepanjang 108.000 km, serta kekayaan sumber daya laut yang melimpah¹. Potensi kelautan tersebut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk sebagai penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor kelautan.

Besarnya potensi tersebut juga menciptakan kerentanan terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan maritim. Aktivitas seperti *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, penyelundupan lintas batas, serta degradasi lingkungan laut, menjadi tantangan serius yang mengancam kedaulatan wilayah dan ketahanan sumber daya. Laporan Indonesian *Ocean Justice Initiative (IOJI)* mencatat kerugian akibat praktik IUU *Fishing* mencapai sekitar 4 miliar dolar AS per tahun². Nilai ini mencerminkan skala ancaman yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak pada kelangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Indonesia memiliki 18% dari total luas terumbu karang dunia³, mayoritas terletak di kawasan timur yang masuk dalam wilayah Segitiga Terumbu

Karang atau *Coral Triangle*. Kawasan ini meliputi perairan enam negara anggota CTI-CFF, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Ekosistem di kawasan tersebut mendukung kehidupan lebih dari 400 juta jiwa yang bergantung pada sumber daya laut⁴. Tekanan terhadap kawasan ini semakin meningkat akibat eksploitasi berlebih dan lemahnya pengelolaan kawasan pesisir.

Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) dibentuk sebagai respons atas kerusakan sumber daya laut yang meluas di kawasan Segitiga Terumbu Karang. Inisiatif ini menjadi kerangka kerja sama multilateral untuk mendorong pengelolaan kelautan berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan, dan perlindungan ekosistem strategis melalui tata kelola lintas negara. Indonesia memegang peran penting, tidak hanya sebagai negara pemrakarsa, tetapi juga sebagai tuan rumah Sekretariat Regional dan pemilik kawasan terumbu karang terbesar di antara negara anggota.

Posisi strategis Indonesia dalam CTI-CFF tercermin melalui kepemimpinan dalam sejumlah program prioritas seperti pengelolaan bentang laut, kawasan konservasi laut, serta adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir. Komitmen ini diwujudkan melalui implementasi program-program nasional yang selaras dengan Rencana Aksi Regional, seperti *Marine Protected Areas*, *Seascape*, dan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Ketiganya menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam memperkuat pengawasan wilayah laut, mendorong keterlibatan masyarakat pesisir, dan membangun ketahanan

¹ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2023*, vol. XX (Badan Pusat Statistik, 2017).

² Kunto Tjahjono, "Optimalisasi Penegakan Hukum Illegal Unreported and Unregulated (Iuu) Fishing Guna Mendukung Program Ekonomi Biru Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional," *Lemhannas Ri*, 2023.

³ Tetty Magdalena, "Kepentingan Indonesia Aktif Dalam CTI (Coral Triangle Initiative)," *JOM Fisip* 3, no. 2 (2016): 1–23.

⁴ Suharyanto, "Prakarsa Segitiga Terumbu Karang Dunia Untuk Terumbu Karang, Perikanan Dan Ketahanan Pangan," 2018, 1–64.

ekologi yang sejalan dengan kepentingan keamanan maritim nasional.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam CTI-CFF menunjukkan upaya strategis untuk mengintegrasikan agenda konservasi lingkungan dengan penguatan keamanan maritim nasional. Pemanfaatan CTI-CFF sebagai instrumen kerja sama regional turut memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman maritim non-tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia melalui mekanisme kerja sama CTI-CFF dalam upaya meningkatkan keamanan maritim secara berkelanjutan.

KERANGKA TEORI

Teori: Neoliberalisme Institusional

Penelitian ini menggunakan teori Neoliberalisme Institusional yang menekankan pentingnya peran institusi internasional dalam membentuk kerja sama antarnegara⁵. Menurut Steven Lamy, negara merupakan aktor rasional yang mengejar kepentingan absolut melalui kerja sama, bukan kompetisi. Institusi internasional berperan menyediakan aturan, norma, dan mekanisme pengawasan untuk mendorong kepercayaan, transparansi, serta kepatuhan di antara anggota.

CTI-CFF mencerminkan implementasi prinsip-prinsip tersebut melalui penguatan tata kelola kelautan, pertukaran informasi, dan koordinasi kebijakan lintas negara. Keterlibatan Indonesia dalam CTI-CFF menunjukkan pemanfaatan institusi sebagai sarana memperkuat keamanan maritim melalui kerja sama regional yang terstruktur dan berkelanjutan.

Tingkat Analisa: Negara

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis negara (*nation-state*) yang memandang negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Negara memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan dan bertindak berdasarkan kepentingan nasional, termasuk menjaga kedaulatan, keamanan, serta stabilitas wilayah maritim. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran terhadap bagaimana strategi kebijakan Indonesia disusun untuk menjawab tantangan keamanan maritim melalui kerja sama regional.

Fokus utama terletak pada peran Indonesia sebagai pengambil kebijakan yang aktif memanfaatkan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) sebagai instrumen untuk memperkuat posisi maritim. Tindakan yang diambil mencerminkan kepentingan nasional dalam menjaga sumber daya laut, mengatasi ancaman lintas batas, serta memperkuat kerja sama multilateral yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan kawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan serta memahami fenomena berdasarkan data yang telah dikumpulkan, bukan melalui angka melainkan melalui narasi dan analisis kontekstual. Fokus diarahkan pada upaya Indonesia dalam memperkuat keamanan maritim melalui CTI-CFF, sehingga interpretasi data bersifat mendalam dan berorientasi pada makna strategis dari kebijakan yang dijalankan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu penelusuran terhadap berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, dokumen resmi CTI-CFF, laporan kebijakan kelautan,

⁵ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*, 2018.

serta buku dan artikel akademik yang relevan. Pendekatan ini memberikan landasan yang komprehensif untuk menjelaskan strategi Indonesia berdasarkan informasi yang telah tersedia secara sah dan terverifikasi. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis guna membangun pemahaman terhadap peran CTI-CFF sebagai mekanisme kerja sama dalam memperkuat keamanan maritim nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan Maritim di Indonesia

Keamanan maritim memiliki arti strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayahnya didominasi oleh laut. Konsep keamanan ini mencakup perlindungan terhadap wilayah laut dari berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Pengelolaan keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga melibatkan aspek lingkungan, ekonomi, serta hubungan antarnegara dalam menjaga stabilitas kawasan maritim⁶.

Letak geografis Indonesia sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikannya jalur lalu lintas maritim yang sangat penting. Kondisi ini menempatkan perairan Indonesia sebagai kawasan yang sangat terbuka terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perompakan, serta pencemaran laut. Karakteristik tersebut menuntut pendekatan keamanan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan serta keberlanjutan sumber daya laut.

Berbagai gangguan terhadap keamanan maritim semakin kompleks

seiring berkembangnya dinamika kawasan. Ancaman IUU Fishing menjadi salah satu isu yang paling menonjol. Laporan *Indonesian Ocean Justice Initiative* menyebutkan bahwa potensi kerugian Indonesia akibat praktik IUU Fishing mencapai hampir 4 miliar dolar AS setiap tahun⁷. Kerugian ini mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga rusaknya ekosistem laut serta terganggunya kehidupan nelayan tradisional yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya hayati laut.

Sumber daya laut Indonesia menyimpan kekayaan yang sangat besar, terutama pada wilayah-wilayah yang termasuk dalam Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*). Wilayah ini mencakup sebagian besar perairan timur Indonesia yang menjadi habitat penting berbagai spesies laut. Keberadaan terumbu karang tidak hanya menopang ketahanan pangan melalui sektor perikanan, tetapi juga menjadi benteng alami terhadap bencana alam pesisir seperti abrasi dan gelombang tinggi. Kerusakan terhadap ekosistem ini akan berdampak langsung pada keamanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.

Kondisi geografis yang luas serta kepulauan yang tersebar menuntut pengelolaan keamanan maritim secara kolektif dan berbasis kerja sama. Penguatan kapasitas pengawasan, penegakan hukum, serta pendidikan masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan maritim nasional. Pendekatan yang hanya mengandalkan kekuatan negara tidak lagi memadai, terutama dalam menghadapi kejahatan lintas batas dan degradasi lingkungan yang bersifat sistemik dan lintas yurisdiksi.

⁶ Christian Bueger, "What Is Maritime Security?," *Marine Policy* 53, no. February (2015): 159–64.

⁷ Tjahjono, "Optimalisasi Penegakan Hukum Illegal Unreported and Unregulated (Iuu) Fishing Guna Mendukung Program Ekonomi Biru Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional."

Penguatan kerja sama multilateral melalui inisiatif seperti CTI-CFF menjadi alternatif strategis yang mendukung pengelolaan keamanan maritim secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas negara memberikan peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjaga ekosistem laut, tetapi juga memperkuat posisi diplomatik dalam isu keamanan non-tradisional. Kontribusi Indonesia dalam kerja sama ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan maritim telah berkembang ke arah yang lebih kolaboratif dan berbasis tata kelola lingkungan yang inklusif.

CTI-CFF Sebagai Mekanisme Kerja Sama Regional

Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) merupakan bentuk kerja sama multilateral yang dibentuk untuk melindungi keanekaragaman hayati laut di kawasan Segitiga Terumbu Karang⁸. Inisiatif ini melibatkan enam negara yang disebut CT6, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Kerja sama ini berfokus pada pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan ekosistem, serta penguatan ketahanan pangan melalui pendekatan konservasi yang berkelanjutan.

Pembentukan CTI-CFF diprakarsai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006 dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati (CBD) ke-8⁹. Deklarasi resmi dilaksanakan pada tahun 2009 di Manado sebagai bentuk komitmen politik regional untuk memperkuat kerja

sama pengelolaan terumbu karang. Indonesia memiliki posisi yang signifikan karena menguasai luas wilayah terumbu karang terbesar di antara negara anggota lainnya. Peran ini menempatkan Indonesia sebagai aktor kunci dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan regional.

Struktur kelembagaan CTI-CFF dibentuk secara kolektif melalui pertemuan rutin para pejabat tinggi atau *Senior Official Meeting* (SOM) dan Konferensi Menteri (*Ministerial Meeting*). Setiap negara anggota memiliki kewajiban menyusun *National Plan of Action* (NPOA) yang disesuaikan dengan tujuan *Regional Plan of Action* (RPOA). NPOA bertujuan menyelaraskan program konservasi di tingkat nasional agar sejalan dengan target regional, sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan kelautan yang bersifat lintas batas.

Sebagai wujud komitmen nasional, Indonesia membentuk *National Coordinating Committee* (NCC) pada tahun 2009. Komite ini memimpin pelaksanaan NPOA dan RPOA melalui kelompok kerja tematik yang mencakup bentang laut, perikanan, kawasan lindung, spesies terancam, perubahan iklim, serta pengembangan kapasitas dan evaluasi¹⁰. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kerja sama ini di tingkat nasional.

Komitmen Indonesia terhadap CTI-CFF diwujudkan melalui berbagai program konservasi, seperti penetapan kawasan konservasi laut, zonasi alat

⁸ "About | CTI-CFF," accessed May 14, 2025, <https://www.coraltriangleinitiative.org/about>.

⁹ Ni Luh Ketut Ayu Irayani, Idin Fasisaka, and Anak Agung Ayu Intan Parameswari, "Faktor-Faktor Pendorong Peran Aktif Indonesia Dalam Kerjasama Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (Cti-Cff) Tahun 2006-2014," *OJS Unud*, 2014, 1–15.

¹⁰ Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, "Salinan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Nasional Cti-Cff Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security (CTI-CFF) Ind" (Jakarta, 2018).

tangkap, serta pendidikan masyarakat pesisir. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menerapkan prinsip tata kelola berbasis ekosistem sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas eksploitasi yang merusak. Alokasi anggaran nasional dan dukungan mitra pembangunan turut mendorong pelaksanaan program secara lebih efektif.

Penerapan CTI-CFF sebagai mekanisme kerja sama regional memberi ruang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi lingkungan dan keamanan maritim. Forum ini tidak hanya menjadi sarana perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga mendukung integrasi kebijakan nasional dalam kerangka kerja sama kawasan. Pendekatan kolektif yang dikembangkan melalui CTI-CFF memperlihatkan sinergi antara kepentingan ekologi, ekonomi, dan geopolitik dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut secara bersama.

Regional Plan of Action (RPOA) 1.0

Regional Plan of Action (RPOA) 1.0 merupakan panduan awal kerja sama CTI-CFF yang disusun untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan Segitiga Terumbu Karang¹¹. Dokumen ini menjadi kerangka strategis bagi enam negara anggota dalam membentuk kebijakan nasional yang sejalan dengan tujuan regional. RPOA 1.0 menekankan pentingnya upaya kolektif dalam melindungi keanekaragaman hayati laut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tujuan utama RPOA 1.0 mencakup lima pilar strategis, yakni: pengelolaan kawasan laut berbasis ekosistem, perikanan berkelanjutan,

pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim, konservasi spesies yang terancam punah, dan pembentukan jaringan kawasan konservasi laut yang efektif. Kelima pilar tersebut diterapkan oleh masing-masing negara melalui *National Plan of Action (NPOA)* yang disesuaikan dengan kondisi domestik. Perumusan strategi dilakukan secara partisipatif dan didukung oleh organisasi mitra pembangunan serta sektor non-pemerintah.

RPOA 1.0 menggunakan prinsip-prinsip kerja sama berbasis ilmu pengetahuan, keberpihakan pada masyarakat lokal, dan integrasi komitmen internasional dalam pelaksanaannya. Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui mekanisme pelaporan dan pertemuan regional. Rencana aksi ini menjadi fondasi penting dalam penguatan tata kelola laut kawasan dan membuka jalan bagi pengembangan strategi lanjutan melalui RPOA 2.0.

Regional Plan of Action (RPOA) 2.0

Regional Plan of Action (RPOA) 2.0 disusun sebagai pembaruan dari strategi kerja sama sebelumnya dan mencakup periode 2021 hingga 2030¹². Penyusunan rencana ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan kerja sama terhadap tantangan baru, seperti tekanan pembangunan pesisir, degradasi habitat, serta dampak perubahan iklim yang semakin intensif. RPOA 2.0 menegaskan kembali pentingnya kerja sama lintas negara dalam memastikan perlindungan kawasan terumbu karang dan keberlanjutan sumber daya laut.

Struktur RPOA 2.0 terdiri dari dua target utama, tiga tujuan, tujuh sasaran, tujuh belas kegiatan regional,

¹¹ CTI-CFF Regional Secretariat, *Regional Plan of Action Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security (CTI-CFF)* (Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2016).

¹² CTI-CFF Regional Secretariat, *Regional Plan of Action (RPOA) 2.0* (Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2022).

tiga puluh tiga hasil yang diharapkan, dan sembilan puluh keluaran yang menjadi acuan pelaksanaan. Setiap elemen dirancang agar negara anggota dapat menyesuaikan kebijakan nasional tanpa mengabaikan keselarasan regional. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam implementasi rencana ini, termasuk sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat lokal.

Prinsip-prinsip dalam RPOA 1.0 tetap dijadikan pedoman pelaksanaan RPOA 2.0. Beberapa di antaranya mencakup pendekatan berbasis masyarakat, keberpihakan pada konservasi, penggunaan sains sebagai dasar kebijakan, serta inklusivitas dan penghormatan terhadap kerentanan ekosistem kepulauan. Penguatan koordinasi antarnegara dan harmonisasi kebijakan menjadi bagian tak terpisahkan dari komitmen kolektif untuk menghadapi tantangan kelautan secara lebih responsif dan adaptif.

Regulasi Keuangan dalam CTI-CFF

Regulasi keuangan CTI-CFF disusun melalui skema kontribusi sukarela antar negara anggota yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing¹³. Pendanaan juga diperoleh dari mitra pembangunan seperti USAID, ADB, dan organisasi konservasi global. Sekretariat Regional bertugas mengelola keuangan tersebut secara transparan, dengan pengawasan oleh Committee of Senior Officials agar alokasi anggaran berjalan akuntabel dan efisien.

Setiap program dalam CTI-CFF wajib disertai perencanaan keuangan yang jelas serta laporan berkala. Dana dialokasikan berdasarkan prioritas dalam

Rencana Aksi Regional dan Nasional. Mekanisme pembiayaan kolektif ini mencerminkan komitmen negara-negara CT6 dalam mendukung konservasi laut dan ketahanan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Capaian Program CTI-CFF di Indonesia Tahun 2019-2021

Pelaksanaan program CTI-CFF di Indonesia pada kurun waktu 2019 hingga 2021 menunjukkan dinamika dan perkembangan yang konsisten dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Rentang waktu ini menjadi penting karena mencerminkan transisi strategi dari implementasi awal menuju penguatan kelembagaan dan adaptasi terhadap tantangan baru, termasuk pandemi global. Berbagai capaian yang diraih tidak hanya menandai keberhasilan teknis di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong agenda konservasi laut dan keamanan maritim melalui kerangka kerja sama regional.

Tahun 2019, Indonesia berhasil memperluas cakupan *Marine Spatial Planning* (MSP) sebagai fondasi pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan¹⁴. Perencanaan ini mencakup seluruh wilayah provinsi dengan penyusunan lebih dari seratus dokumen rencana zonasi laut. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam tata kelola ruang laut, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam menghindari tumpang tindih pemanfaatan wilayah pesisir serta konflik antar sektor pemanfaatan laut.

Selain aspek perencanaan, pelaksanaan MSP turut didukung oleh

¹³ CTI-CFF Regional Secretariat, *Financial Regulations & Financial Policies and Procedures Manual Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2023).

¹⁴ CTI-CFF Regional Secretariat, *Annual Report 2019: Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2020).

penguatan sistem informasi spasial serta keterlibatan lintas sektor dan pemangku kepentingan lokal. Implementasi ini menunjukkan bahwa pendekatan ruang menjadi alat penting dalam memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut dan ketertiban pemanfaatan wilayah pesisir. Capaian ini memperkuat posisi Indonesia dalam pelaksanaan pilar pengelolaan bentang laut pada kerangka CTI-CFF yang dipimpinnya sendiri.

Tahun 2020, fokus pengelolaan bergeser ke pendekatan *seascape* yang mencakup wilayah-wilayah strategis seperti Sulu-Sulawesi, Lesser Sunda, dan Laut Banda¹⁵. Pendekatan ini menekankan pengelolaan ekosistem secara terintegrasi lintas sektor dan lintas batas administratif, serta melibatkan komunitas lokal dalam praktik konservasi. Pemerintah menyusun dokumen *Policy Brief Seascape* sebagai panduan strategis dalam implementasi, yang selaras dengan target Rencana Aksi Nasional dan Regional CTI-CFF.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan, *Coral Stock Center* didirikan di Manado untuk menunjang konservasi dan restorasi terumbu karang secara nasional. Selain itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam forum SOMACORE memperkuat kolaborasi regional dalam mendukung ketahanan sosial-ekologis kawasan pesisir. Capaian ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya aktif di tingkat nasional, tetapi juga memimpin inisiatif kerja sama regional berbasis ekosistem.

Tahun 2021, prioritas program diarahkan pada penguatan konservasi dan pengelolaan berbasis spasial yang responsif terhadap dinamika pasca

pandemi¹⁶. Pemerintah memetakan jalur kabel bawah laut serta mengembangkan strategi pengelolaan untuk wilayah Laut Sawu dan Selat Makassar. Langkah ini didukung oleh pendekatan berbasis ilmu pengetahuan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi pemetaan serta integrasi kebijakan sektoral untuk mendukung konservasi adaptif di wilayah penting secara ekologis.

Pembentukan *Coral Triangle Conservation Trust Fund* menjadi terobosan penting dalam menjamin pembiayaan konservasi jangka panjang. Upaya ini diiringi oleh pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal melalui pendekatan edukasi berbasis ekosistem, yang memperkuat peran komunitas pesisir dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Capaian tahun ini menunjukkan pergeseran strategi konservasi ke arah yang lebih inklusif dan partisipatif, sejalan dengan prinsip-prinsip CTI-CFF.

Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengimplementasikan program CTI-CFF secara adaptif dan terukur sesuai dengan dinamika nasional maupun regional. Kemajuan dalam perencanaan spasial, penguatan kelembagaan, hingga pengelolaan sumber daya pesisir menjadi indikator keberhasilan yang mendukung tercapainya tujuan konservasi dan keamanan maritim. Konsistensi dalam menjalankan program juga mencerminkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap perlindungan ekosistem laut sekaligus memperkuat peran strategisnya dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang.

¹⁵ CTI-CFF Regional Secretariat, *CTI-CFF Annual Report 2020* (Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2019).

¹⁶ CTI-CFF Regional Secretariat, *CTI-CFF Annual Report 2021* (Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2022).

Tantangan Pelaksanaan Program CTI-CFF di Indonesia

Tantangan utama dalam pelaksanaan program CTI-CFF di Indonesia terletak pada aspek koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Kompleksitas struktur pemerintahan dan beragamnya kepentingan antar instansi menyebabkan sinkronisasi kebijakan dan implementasi di lapangan seringkali tidak selaras. Keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah juga menghambat pelaksanaan program secara konsisten, terutama pada kawasan pesisir yang menjadi fokus konservasi. Pelibatan masyarakat lokal masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam perencanaan strategis, sehingga menurunkan efektivitas pelaksanaan program konservasi dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Kendala lainnya mencakup keterbatasan anggaran dan ketergantungan terhadap dukungan mitra internasional dalam pembiayaan program. Keterbatasan infrastruktur pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di kawasan pesisir turut memperbesar risiko praktik eksploitasi ilegal. Tantangan-tantangan tersebut menuntut penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi kebijakan antar level pemerintahan agar pelaksanaan CTI-CFF dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi Indonesia Meningkatkan Keamanan Maritim melalui CTI-CFF

Strategi Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim tidak terlepas dari peran aktifnya dalam kerja sama CTI-CFF. Keterlibatan ini dimanfaatkan untuk mengintegrasikan tujuan konservasi dengan kebutuhan strategis nasional di sektor kelautan. Melalui pendekatan lintas batas dan berbasis ekosistem, Indonesia

merancang berbagai program yang mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kontrol terhadap wilayah perairan yang rentan terhadap ancaman non-tradisional.

Strategi pertama ditempuh melalui pengembangan kawasan konservasi laut yang terintegrasi dalam *Coral Triangle Marine Protected Area System* (CTMPAS). Penetapan MPA menciptakan zona pengawasan prioritas yang mempermudah aparat dalam mendeteksi serta menindak aktivitas *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing*, penyelundupan, dan kejahatan lintas batas lainnya. MPA tidak hanya menjadi ruang konservasi, tetapi juga menjaga kedaulatan dan kontrol negara atas wilayah-wilayah maritim strategis, sehingga memperkuat peran pengawasan negara.

Peningkatan efektivitas MPA juga didorong melalui penyusunan pedoman evaluasi pengelolaan, seperti EVIKA, serta pelatihan tim penilai di lapangan. Upaya ini memperluas fungsi kawasan konservasi sebagai zona strategis keamanan maritim berbasis ekosistem. Penguatan manajemen, sistem data, dan pelibatan masyarakat pada program MPA mendukung pengendalian aktivitas maritim ilegal sekaligus menciptakan stabilitas di wilayah perairan yang sebelumnya rawan konflik pemanfaatan sumber daya laut.

Penguatan strategi keamanan maritim juga diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lintas batas wilayah laut dalam program *Seascope*. Wilayah-wilayah seperti Sulu-Sulawesi dan Lesser Sunda menjadi prioritas pengembangan tata kelola karena posisinya yang strategis berbatasan langsung dengan negara lain. Program ini mendukung pembentukan struktur kerja bersama, seperti sub-regional mechanism dan proyek SOMACORE,

yang berfungsi memperkuat koordinasi teknis dan meningkatkan kapasitas pengawasan antarnegara. Pendekatan ini berkontribusi dalam mencegah eksploitasi lintas batas dan meningkatkan deteksi dini terhadap aktivitas ilegal di wilayah maritim perbatasan.

Melalui *Seascope*, Indonesia juga menerapkan pendekatan *Marine Spatial Planning* (MSP) yang memungkinkan pemetaan ruang laut untuk zona ekonomi, konservasi, dan keamanan secara terintegrasi. Implementasi MSP memperkuat efektivitas pengendalian aktivitas laut dan memperjelas batas pengelolaan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik serta memperkuat stabilitas geopolitik kawasan.

Strategi ketiga dilaksanakan melalui program pengelolaan perikanan berkelanjutan yang berbasis ekosistem atau *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM). Pemerintah menetapkan zona perikanan lestari, menerapkan sistem logbook kapal perikanan, serta memantau stok ikan menggunakan pendekatan ilmiah. Kebijakan ini mendukung transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan memungkinkan deteksi dini atas praktik overfishing maupun penangkapan ilegal. Melalui penguatan sistem ini, Indonesia mempersempit ruang operasi IUU *Fishing* yang selama ini menjadi tantangan besar dalam keamanan maritim.

Langkah lainnya mencakup pengembangan strategi panen (*harvest strategy*) untuk komoditas rajungan, kakap, dan kerapu serta partisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti IOTC dan WCPFC. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian stok ikan, tetapi juga memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola perikanan regional.

Melalui pelaksanaan ketiga program utama tersebut, Indonesia

menunjukkan bahwa pendekatan konservasi laut dapat digunakan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas maritim. Integrasi antara perlindungan ekosistem, pengelolaan wilayah pesisir, dan penguatan tata kelola perikanan menciptakan fondasi yang kuat bagi terciptanya keamanan maritim yang berkelanjutan. Strategi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam arsitektur keamanan kawasan, sekaligus memperkuat legitimasi diplomatiknya dalam forum kerja sama regional.

KESIMPULAN

CTI-CFF menjadi wadah strategis bagi Indonesia dalam menjawab tantangan keamanan maritim melalui pendekatan konservasi dan tata kelola sumber daya laut yang berkelanjutan. Pemanfaatan forum ini mendorong terciptanya sinergi antara kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling mendukung stabilitas kawasan. Peran aktif Indonesia dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program lintas negara, dan penguatan kapasitas nasional tercermin melalui inisiatif seperti *Marine Protected Areas*, *Seascope*, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Implementasi ketiga program tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam menjaga kawasan Segitiga Terumbu Karang yang memiliki nilai ekologis dan geopolitik tinggi.

Upaya peningkatan keamanan maritim tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat pesisir. Strategi ini selaras dengan prinsip-prinsip CTI-CFF yang menekankan pendekatan berbasis ekosistem, keterlibatan multipihak, serta koordinasi lintas sektor dan wilayah. Pada ancaman maritim non-tradisional seperti IUU *Fishing*, eksploitasi berlebih, dan kerusakan ekosistem, keterlibatan

Indonesia dalam CTI-CFF menjadi bentuk respons kebijakan yang tidak hanya defensif, tetapi juga transformatif.

Konsistensi Indonesia dalam forum CTI-CFF mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap keamanan maritim yang berkelanjutan dan berbasis konservasi. Partisipasi ini turut memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam arsitektur kerja sama maritim kawasan Indo-Pasifik. Melalui pelaksanaan kerja sama multilateral secara efektif, Indonesia tidak hanya memperkuat perlindungan sumber daya lautnya, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan maritim regional secara kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- “About | CTI-CFF.” Accessed May 14, 2025.
<https://www.coraltriangleinitiative.org/about>.
- Bueger, Christian. “What Is Maritime Security?” *Marine Policy* 53, no. February (2015): 159–64.
- CTI-CFF Regional Secretariat. *Annual Report 2019: Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*. Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2020.
- . *CTI-CFF Annual Report 2020*. Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2019.
- . *CTI-CFF Annual Report 2021*. Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2022.
- . *Financial Regulations & Financial Policies and Procedures Manual Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*. Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2023.
- . *Regional Plan of Action (RPOA) 2.0*. Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2022.
- . *Regional Plan Of Action Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security (CTI-CFF)*. Manado, North Sulawesi: CTI-CFF Regional Secretariat, 2016.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2023*. Vol. XX. Badan Pusat Statistik, 2017.
- Dugis, Vinsensio. *Teori Hubungan Internasional ; Perspektif-Perspektif Klasik*, 2018.
- Irayani, Ni Luh Ketut Ayu, Idin Fasisaka, and Anak Agung Ayu Intan Parameswari. “Faktor-Faktor Pendorong Peran Aktif Indonesia Dalam Kerjasama Coral Triangle Initiative on Coral Reefs , Fisheries and Food Security (Cti-Cff) Tahun 2006-2014.” *OJS Unud*, 2014, 1–15.
- Magdalena, Tetty. “Kepentingan Indonesia Aktif Dalam CTI (Coral Triangle Initiative).” *JOM Fisip* 3, no. 2 (2016): 1–23.
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. “Salinan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Nasional Cti-Cff Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security (CTI-CFF) Ind.” Jakarta, 2018.
- Suharyanto. “Prakarsa Segitiga Terumbu Karang Dunia Untuk Terumbu Karang, Perikanan Dan Ketahanan Pangan,” 2018, 1–64.
- Tjahjono, Kunto. “Optimalisasi Penegakan Hukum Illegal Unreported and Unregulated (Iuu) Fishing Guna Mendukung Program Ekonomi Biru Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional.” *Lemhannas Ri*, 2023.